



Pengelolaan Eksternalitas Lingkungan dalam Sektor Pariwisata Melalui Penerapan *Green Economy* di Indonesia

Esta Azzahra ^{1*}, Aji Ali Akbar ²

^{1,2} Universitas Tanjungpura, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Korespondensi penulis: D1051211038@student.untan.ac.id *

Abstract. *In the era of globalization and rapid technological development, sustainable development has become crucial for a country's growth, especially in the tourism sector, which has significant potential to drive economic growth and environmental conservation. This research aims to examine how environmental externalities from the tourism sector can be effectively managed through the application of green economy principles. The method used is a qualitative approach with literature study, which includes analysis of the concept of green economy, the impact of tourism on society, and policies that can internalize negative impacts. The research results indicate that the application of green economy principles can reduce negative externalities caused by tourism, such as pollution and ecosystem damage, while also improving the welfare of local communities. Policies such as Pigovian taxes, subsidies, and regulations are necessary to support this implementation. Therefore, sustainable tourism management through green economy not only focuses on economic profit but also on environmental and social sustainability.*

Keywords: *Environmental Externalities, Environmental Management, Green Economy, Sustainable Development, Sustainable Tourism*

Abstrak. Seiring dengan meningkatnya globalisasi serta percepatan inovasi teknologi., pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting bagi pengembangan suatu negara, terutama dalam sektor pariwisata yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eksternalitas lingkungan dari sektor pariwisata dapat dikelola secara efektif melalui penerapan green economy. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang mencakup analisis konsep green economy, dampak pariwisata terhadap masyarakat, serta kebijakan yang dapat menginternalisasi dampak negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip green economy dapat mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan seperti pajak Pigovian, subsidi, dan regulasi diperlukan untuk mendukung implementasi ini. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan melalui green economy tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Kata kunci: Eksternalitas Lingkungan, Green Economy, Pariwisata Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Lingkungan

1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi yang semakin intensif dan pesatnya perkembangan teknologi menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai pilar utama dalam kemajuan suatu negara. Keberhasilan pembangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sektor pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu sektor strategis yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus berperan dalam pelestarian lingkungan melalui penerapan konsep ekonomi hijau (*green economy*) (Diputra 2024). Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), *green economy* merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan, sambil menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem.

Di Indonesia, pariwisata menyumbang sekitar 4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan 7,75% lapangan kerja nasional (Kemenparekraf 2020). Namun, pengelolaan pariwisata yang kurang tepat dapat menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan, seperti penurunan kualitas air, udara, dan tanah, peningkatan kebisingan, serta menurunnya kebersihan lingkungan (Prayoga 2023). Eksternalitas lingkungan adalah dampak sampingan yang sering tidak diperhitungkan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata (Wahyudi and Ardianto 2022). Oleh sebab itu, pengelolaan eksternalitas lingkungan menjadi hal penting agar pengembangan pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berwawasan lingkungan melalui penerapan *green economy*. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana eksternalitas lingkungan dari sektor pariwisata dapat dikelola secara efektif melalui penerapan konsep *green economy*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai sumber informasi mengenai konsep *green economy* serta pengelolaan eksternalitas lingkungan dalam sektor pariwisata. Data yang dikumpulkan meliputi literatur ilmiah, laporan penelitian, kebijakan terkait *green economy*, dan studi kasus penerapan konsep tersebut dalam sektor pariwisata. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan konsep *green economy* yang efektif dalam mengelola eksternalitas lingkungan, guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Eksternalitas Lingkungan dalam Teori Ekonomi pada Sektor Pariwisata

Eksternalitas merupakan suatu dampak yang timbul dari aktivitas ekonomi yang memengaruhi kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat tanpa adanya kompensasi atau biaya tambahan bagi pihak yang menimbulkan dampak tersebut (Hidayah, 2024).

Eksternalitas sering kali disebabkan oleh adanya sumber daya bersama yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh siapa saja yang ada di sekitarnya (Nurlatifah, 2021). Terkait dengan sumber daya alam, eksternalitas menjadi hal yang penting untuk dipahami karena berhubungan dengan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Terjadinya eksternalitas mengakibatkan perbedaan antara manfaat (atau biaya) yang diterima oleh masyarakat dengan manfaat (atau biaya) yang dirasakan oleh individu. Pihak yang menimbulkan eksternalitas tidak merasa terdorong untuk menanggung dampak negatif yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Dalam perekonomian yang menganut sistem pasar persaingan sempurna, output individu yang optimal tercapai ketika biaya marginal individu setara dengan harga (Fahrizal, 2016).

Teori ekonomi membedakan eksternalitas menjadi dua kategori utama, yakni eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi apabila aktivitas ekonomi memberikan manfaat tambahan bagi pihak lain, seperti peningkatan kualitas lingkungan yang dihasilkan dari program konservasi. Sebaliknya, eksternalitas negatif timbul ketika kegiatan ekonomi menimbulkan biaya sosial yang tidak langsung ditanggung oleh pelaku, seperti kerusakan pada sumber daya alam akibat limbah yang dihasilkan, serta penurunan kualitas hidup karena pencemaran (Dewi, Murtisari & Saleh 2019).

Eksternalitas positif merujuk pada tindakan suatu pihak yang menghasilkan manfaat bagi pihak lain tanpa kompensasi langsung. Aktivitas pariwisata, misalnya, sering kali membawa dampak positif bagi masyarakat lokal melalui peningkatan kesejahteraan, terciptanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. HSB (2019) menemukan bahwa pariwisata memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang, di negara maju maupun berkembang. Pariwisata internasional, oleh karena itu, berperan sebagai motor penggerak utama dalam mendukung kemajuan ekonomi global. Astuti dalam Wahyudi & Ardianto (2022) turut memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa pariwisata internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian global melalui pemenuhan kebutuhan sektor pariwisata, perdagangan ekspor-impor, serta efek redistribusi pendapatan dari wisatawan asing ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Eksternalitas positif dalam sektor pariwisata tidak hanya berupa manfaat ekonomi, tetapi juga sosial. Pariwisata dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan alam, museum, seni, dan tradisi kerakyatan (Widarjono & Asworowati 2016). Eksternalitas positif dapat muncul jika sektor pariwisata menerapkan prinsip-prinsip pariwisata

berkelanjutan dan konsep green economy. Pelaku industri pariwisata yang berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dapat menciptakan dampak positif yang signifikan (Cahyono, 2024).

Sebaliknya, eksternalitas negatif muncul ketika aktivitas produksi menimbulkan kerugian bagi pihak lain di luar mekanisme pasar tanpa adanya kompensasi atau tanggung jawab dari pelaku utama. Pencemaran lingkungan menjadi salah satu contoh nyata dari fenomena ini (Dewi, Murtisari & Saleh, 2019). Ketika suatu kegiatan menimbulkan dampak merugikan bagi pihak lain namun tidak disertai tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan, maka terjadilah eksternalitas negatif yang mengganggu keseimbangan sosial dan lingkungan (Hairunisya, Anggreini & WH, 2020).

Pada eksternalitas negatif, Biaya yang ditanggung oleh masyarakat atau disebut juga biaya sosial (*social cost*) cenderung lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang dihitung oleh pelaku usaha. Kondisi ini mencerminkan adanya eksternalitas negatif, di mana kerugian yang timbul dari kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya diperhitungkan oleh pihak yang menyebabkan. Ketika eksternalitas negatif terjadi, harga yang terbentuk di pasar hanya mencerminkan biaya internal, sedangkan biaya sosial yang lebih luas (*marginal social cost*) tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien karena tidak mencerminkan biaya sosial tambahan yang sebenarnya ditanggung oleh masyarakat luas (Hidayah, 2024).

Dalam sektor pariwisata, eksternalitas negatif sering kali muncul dari peningkatan jumlah wisatawan yang melebihi daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Ketika jumlah wisatawan melampaui batas kapasitas, hal ini dapat menyebabkan penumpukan sampah, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas udara akibat tingginya penggunaan kendaraan. Biaya dari kerusakan ini tidak langsung dibebankan kepada pelaku industri pariwisata, melainkan harus ditanggung oleh masyarakat lokal dalam bentuk degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup (Nuryadin, Sodik & Artaningtyas, 2021).

Objek wisata Maribaya *Natural Hot Spring Resort* merupakan salah satu contoh nyata dari eksternalitas negatif di sektor pariwisata. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata ini menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan, seperti kemacetan lalu lintas pada akhir pekan, pencemaran udara, lonjakan harga sewa tempat usaha, serta pembangunan fasilitas penunjang yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kemacetan yang terjadi setiap akhir pekan menghambat aktivitas harian masyarakat, sementara polusi udara yang ditimbulkan meningkatkan potensi gangguan kesehatan, termasuk risiko terkena ISPA (infeksi

saluran pernapasan akut) (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, 2015).

Peran *Green Economy* dalam Mengelola Eksternalitas

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai sistem ekonomi yang mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya alam, rendah emisi karbon, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan *green economy* juga mengacu pada pengembangan ekonomi yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Nurseha et al. 2024). Konsep ekonomi hijau telah bertransformasi dari cara pandang lama yang bersifat untuk “menghijaukan” kegiatan ekonomi agar lebih ramah lingkungan menjadi sebuah paradigma baru yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru yang berkelanjutan (*green jobs*) melalui investasi yang berwawasan lingkungan (*green investment*), serta proses produksi, perdagangan, dan pola konsumsi yang bertanggung jawab (Nurseha et al. 2024).

Konsep *green economy* berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menekan ketimpangan sosial serta menanggulangi kemiskinan secara global (Anwar 2022). Implementasi strategi ini tidak hanya fokus pada penurunan emisi gas rumah kaca demi memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi hijau dianggap sebagai instrumen yang dapat menghasilkan tiga manfaat utama: sumber pendapatan dan lapangan kerja baru; pengurangan emisi karbon, pemakaian sumber daya alam yang lebih efisien, dan penurunan tingkat polusi serta limbah; kontribusi terhadap tujuan sosial yang lebih luas seperti pembangunan yang berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengentasan kemiskinan, meskipun pencapaian tujuan sosial ini tidak selalu terjadi secara langsung (Nurseha et al. 2024).

Green economy sendiri memiliki beberapa konsep dasar, yaitu:

- a. Ekonomi hijau mencerminkan aktivitas ekonomi yang mendukung terciptanya kesejahteraan sosial melalui pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan sistem produksi rendah karbon.
- b. Pendekatan ekonomi hijau menekankan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, inklusif secara sosial, serta memiliki keberlanjutan dari sisi ekonomi.
- c. Konsep ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

- d. Prinsip dasar green economy bertumpu pada pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang (Sari dkk., 2022).

Konsep pariwisata hijau atau *green tourism* sebagaimana dijelaskan oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mengacu pada aktivitas wisata yang menghasilkan dampak positif dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan (UNEP & UNWTO, 2005). Tujuan utama penerapan green economy di sektor pariwisata adalah mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, meningkatkan nilai budaya untuk masyarakat lokal, serta menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengembangan destinasi yang ramah lingkungan dan berbasis pada kekayaan alam (Diputra, 2024). Salah satu implementasinya dapat dilihat dari pengembangan ekowisata yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pengelolaan pariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan elemen penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Peran serta masyarakat mencakup hak untuk terlibat dalam pembangunan kepariwisataan serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan daya tarik destinasi wisata. Pengusaha pariwisata juga memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal dan menyerap tenaga kerja dari komunitas setempat. Komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat lokal ini sejalan dengan agenda global untuk mendorong pariwisata berkelanjutan, yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: kualitas sumber daya lingkungan (*quality of resources*), kepuasan pengalaman wisatawan (*quality of visitor satisfaction*), dan kualitas hidup masyarakat lokal (*quality of local community*) (Wiratma & Nurgiyanti 2019)

Berdasarkan 10 prinsip utama, implementasi *green economy* di sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif dengan fokus pada aspek-aspek berikut: mengutamakan kualitas, nilai guna, dan nilai intrinsik; mengikuti aliran alam; menjaga keragaman fungsi; menekankan pentingnya keanekaragaman; mendorong partisipasi dan demokrasi; mengembangkan kreativitas serta pembangunan masyarakat; memainkan peran strategis dalam lingkungan binaan; menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan (sampah adalah makanan); menerapkan skala yang sesuai dan proporsi yang tepat; serta mengedepankan kemandirian, pengorganisasian diri, dan perencanaan mandiri (Iriawan et al, 2024).

Contoh implementasi nyata dari konsep *green economy* dapat ditemukan di Kabupaten Banyuwangi, di mana program desa wisata berbasis ekowisata telah berhasil mengubah beberapa desa menjadi destinasi wisata yang populer. Program tersebut tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pengembangan *homestay*, pertanian organik, dan kegiatan wisata alam berbasis ekowisata telah berperan besar dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga setempat (Ali, Saputra & Mahaputra 2023).

Beberapa langkah penting dapat diambil untuk menerapkan *green economy* di sektor pariwisata berdasarkan hasil penelitian. Pertama, pemerintah atau pemangku kebijakan harus memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur terciptanya pariwisata yang berbasis *green economy*. Kedua, kerjasama antara pemerintah, organisasi atau komunitas lingkungan, pihak pariwisata, dan masyarakat perlu dijalin untuk menciptakan *green economy* yang efektif. Ketiga, pembangunan berkelanjutan harus dijadikan landasan utama dalam penerapan *green economy* pada sektor pariwisata. Keempat, upaya pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh industri-industri terkait harus dilakukan oleh pemerintah. Kelima, penyediaan fasilitas kebersihan di destinasi pariwisata sangat penting untuk memastikan lingkungan yang bersih dan ramah pengunjung (Diputra, 2024).

Green Economy berupaya menginternalisasi dampak eksternalitas yang dikenakan kepada pelaku usaha wisata dan wisatawan sebagai Upaya untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi. Secara garis besar, terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani eksternalitas. Ketika eksternalitas terjadi, baik pemerintah maupun pihak swasta dapat merumuskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Langkah-langkah berikut dapat diambil oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lokal untuk mengatasi eksternalitas:

a) *Property Rights* (Hak Kepemilikan)

Hak kepemilikan yang jelas memberikan kepastian terhadap kepemilikan entitas yang memiliki nilai ekonomi. Dengan kepastian hak milik, pelanggaran terhadap hak tersebut akan dikenakan biaya kompensasi, sehingga membantu menginternalisasi dampak eksternal dari aktivitas ekonomi dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab

b) Pajak Pigovian

Pajak yang dibebankan kepada pihak yang menyebabkan eksternalitas dengan tujuan menginternalisasi efek biaya yang ditanggung oleh pihak yang terdampak. Dengan adanya

pajak ini, produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, sehingga tingkat polusi juga akan menurun. (Kumala dkk., 2021)

c) Subsidi dan Regulasi:

Subsidi diberikan sebagai bantuan finansial kepada individu atau kelompok yang terdampak eksternalitas, sementara regulasi adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan daerah untuk mengendalikan perilaku pihak swasta, melindungi masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan (Muhlizi, 2017).

Selain pemerintah, pihak swasta juga dapat mengambil beberapa langkah dalam mengatasi eksternalitas negatif, antara lain:

a) Merger (Penggabungan Dua Aktivitas atau Entitas)

Untuk mengurangi eksternalitas, merger dilakukan dengan menggabungkan dua aktivitas atau entitas bisnis yang berkaitan. Penggabungan ini dapat menciptakan sinergi yang positif, meningkatkan sumber daya, keahlian, dan kapabilitas pendapatan, serta mengurangi dampak negatif terhadap pihak ketiga. Teori sinergi (Synergy Theory) mendukung bahwa penggabungan semacam ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan jika entitas tersebut beroperasi secara terpisah.

b) Kesepakatan Sosial (*Social Conventions*)

Kesepakatan sosial adalah perjanjian tak tertulis yang dibuat dengan pendekatan moral. Sebagai solusi untuk mengatasi eksternalitas negatif, kesepakatan ini melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemangku kepentingan desa untuk menyepakati cara mengurangi dampak negatif dari kegiatan ekonomi yang berlangsung (Ahmad, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *green economy* dalam sektor pariwisata terbukti efektif dalam mengelola eksternalitas lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Melalui penginternalisasian biaya eksternalitas negatif seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta penerapan kebijakan seperti pajak Pigovian dan subsidi, pemerintah dapat mendorong praktik pariwisata berkelanjutan. Selain itu, Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip *green economy* akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal sekaligus memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, A. 2022. "Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dalam Perspektif Islam Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2019." UIN Raden Intan Lampung.
- Ali, H, F Saputra, and M. R Mahaputra. 2023. "Penerapan Green Economy: Analisis Kendaraan Listrik, Pariwisata Dan Batu Bara (Studi Literature)." *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah* 1(1): 1–14.
- Anwar, M. 2022. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4(1S).
- Cahyono, J. P. 2024. "Dinamika Ekonomi Pariwisata: Transformasi Global Dan Tantangan Lokal." *E-Libs Economics Department*: 1–24.
- Dewi, R. S, A Murtisari, and Y Saleh. 2019. "Dampak Eksternalitas Industri Tahu Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo." *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis* 3(3): 201–9.
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. 2015. *Laporan Tahunan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat*. Bandung Barat.
- Diputra, G. I. S. 2024. "Penerapan Green Economy Pada Sektor Pariwisata Di Bali." *Jurnal Ekuilnomi* 6(2): 182–93.
- Fahrizal, M. A. 2016. "Analisis Eksternalitas Pabrik Sinar Palembang Kerupuk Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 17(1): 45–55.
- Hairunisya, N, D Anggreini, and M WH. 2020. "Pemberdayaan Di Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 26(4): 241–47.
- Hidayah, A. 2024. "Analisis Dampak Eksternalitas Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kuliner Di Sentra Wisata Kuliner Medan Marelan." Universitas Islam Sumatera Utara.
- Iriawan, O. A, G. U Saefurrohman, Y Devi, A Aisyah, and N. Nurhayati. 2024. "Dinamika Penerapan Green Economy Dalam Pengembangan Lokasi Pariwisata: Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Jurnal Lan Tabur* 5(2): 212–30.
- Kemenparekraf. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Muhlizi, A. F. 2017. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6(2): 349–68.
- Nurlatifah, E. 2021. "Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Ras Petelur Terhadap Pendapatan Masyarakat Di UD Kidul Rawa FARM Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap." *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis* 3(3): 201–9.
- Nurseha, S. S, E. A Kamelia, V. P. N. B Suri, and M. A. H. Fikri. 2024. "Urgensi Transisi Green Economy Oleh Generasi Muda Terhadap Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2(5): 133–51.
- Nuryadin, D, J Sodik, and W. D Artaningtyas. 2021. "Pendekatan System Dynamics Dalam Perencanaan Strategi Pengembangan Pantai Depok."
- Prayoga, I. R. 2023. "Analisis Eksternalitas Industri Pariwisata Pantai Sari Ringgung Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Masyarakat Setempat." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 5(2): 133–45.
- Sumarsono, S. 2007. *Ekonomi Mikro Teori Dan Soal Latihan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Republik Indonesia.*
- UNEP, and UNWTO. 2011. "Making Tourism More Sustainable: A Guide For Policy Makers." *UNEP & UNWTO*.
- Wahyudi, H, and E. Ardianto. 2022. "Analisis Eksternalitas Positif 'Wisata Alam 21.'" *Jurnal Studi Perhotelan Dan Pariwisata* 1(1): 1–10.
- Widarjono, A, and R Asworowati. 2016. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian: Studi Kasus Di Bali, DIY, NTB Dan Sumut." Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.
- Wiratma, H. D, and T Nurgiyanti. 2019. "Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy Dan Blue Economy." *Nation State: Journal Of International Studies* 2(2): 161–72.